



**RANCANGAN
RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2026**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Swt. atas berkat rahmatNya, Rancangan Renja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2026 dapat disusun.

Sebagaimana Rencana Kerja tahun-tahun yang lalu, Rancangan renja ini juga masih menyimpan banyak kekurangan. Oleh karena itu, walaupun rencana yang kami susun dalam buku ini belum seluruhnya memenuhi keinginan atau kebutuhan sebagaimana yang diharapkan, namun dapat menjadi panduan dan bermanfaat khususnya bagi para pengelola dan pelaksana program di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan, serta mitra terkait di luar sektor instansi dan siapa saja yang memiliki perhatian dan kepentingan terhadap program-program keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluarga, serta memfasilitasi menanggulangi masalah sosial masyarakat.

Akhirnya terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi sejak awal proses penyusunan Rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2026 ini hingga selesai.

Kotapinang, 10 Juni 2025

Kepala Dinas P3AP2KB
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Agustina Nasution, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19660808 198803 2 003

DAFTAR ISI

	Hal:
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6
2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	7
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja	18
3.3. Program dan Kegiatan.....	18
Rencana Kerja OPD Tahun Anggaran 2026.....	19
BAB IV PENUTUP.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen rencana tahunan di OPD mutlak harus tersedia sebagai acuan kerja untuk mengaktualisasikan kinerja program dan kegiatan. Penyusunan dokumen rencana tahunan yang disebut rencana kerja tahunan OPD disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun rencana yang telah mempertimbangkan hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta permasalahan yang dihadapi.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen Renja disusun melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum OPD dan penetapan Renja. Dokumen Renja terbagi atas rancangan Renja yang disusun berdasarkan rancangan awal dan dokumen Renja definitif yang telah disesuaikan dengan dokumen RKPD yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Renja OPD yang disusun selain mengacu pada rancangan awal RKPD dan Renstra, juga mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan renja yang telah diverifikasi oleh Bappeda menjadi bahan penyempurnaan penyusunan rancangan akhir RKPD yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2026 disusun dalam rangka penyediaan dokumen perencanaan OPD satu tahun ke depan yang berisikan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu; tujuan, sasaran, program dan kegiatan; indikator kinerja serta dana indikatif dan prakiraan maju 2026.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474).
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
5. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender.
6. Keputusan Presiden No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
7. Keputusan Presiden No. 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Trafficking.
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol, Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak.
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana.
10. Peraturan Kepala BKKBN No. 82/PERS/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5614).
12. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Provinsi Sumatera Utara.
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09).
16. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 36 Tahun 2018 tentang Manajemen Penanganan Pengaduan Masyarakat Berbasis Partisipatif.
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda No. 9 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05).
19. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah (diubah dengan Perbup No. 23 Tahun 2022).

20. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup No. 4 Tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah.
21. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
22. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Berkualitas.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.
24. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi.
25. Keputusan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 188.45/289/DP3AP2KB/2023 tentang Penetapan Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dokumen renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2026.
2. Sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan prioritas pada tahun 2026.
3. Untuk memberikan arahan bagi sinkronisasi program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra tahun 2021-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab kedua adalah Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Lalu, yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama adalah Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD. Sub kedua adalah Analisis Kinerja Pelayanan OPD. Dan sub bab ketiga adalah Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Bab ketiga adalah Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, yang terdiri dari tiga sub bab, di antaranya Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Program dan Kegiatan.

Bab keempat adalah penutup.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan capaian Renstra OPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Dari gambaran ini nanti, akan terlihat program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun yang lalu. Di samping itu juga akan terlihat berapa target dan realisasi dari program yang telah berjalan, sehingga akan dijumpai persentase pelaksanaan program kegiatan tersebut. Hal ini akan menjadi masukan di dalam melakukan pembuatan rancangan rencana kerja tahun 2026.

Berikut tabel 2.1 mengenai evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun 2025.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berikut tabel 2.2. mengenai capaian kinerja dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2.3. Review terhadap rancangan awal RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas-bawah serta bawah-atas (top down-bottom up).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, di samping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

TABEL 2.1
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024

NO	SASARAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU	TOTAL REALISASI
			Rp	Rp
	Terwujudnya sistem kerja yang akuntabel selama satu tahun	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5,586,892,408	4,938,664,316
	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,009,458,803	3,535,967,417
	Meningkatnya kinerja	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,941,059,115	3,468,223,026
	Meningkatnya kinerja	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29,999,688	29,344,391
	Meningkatnya laporan pertanggung jawaban keuangan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38,400,000	38,400,000
	Tersedianya administrasi kepegawaian opd	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	52,233,152	51,737,100
	Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	52,233,152	51,737,100
	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	354,809,030	343,792,786
	Meningkatnya kinerja dan kenyamanan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,995,588	14,986,190
	Meningkatnya kenyamanan kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14,996,109	14,967,327
	Meningkatnya pelayanan administrasi	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,196,614	12,192,042
	Terkoordinasi kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	312,620,719	301,647,227
	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah opd	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532,623,388	493,946,359

	Meningkatnya administrasi surat-menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,957,696	-
	Meningkatnya kenyamanan kerja	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74,665,692	55,946,359
	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	456,000,000	438,000,000
	Tersedianya pemeliharaan barang milik daerah opd	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	637,768,035	564,957,754
	Meningkatnya keamanan aparaturnya dalam bekerja	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	218,279,035	146,128,754
	Meningkatnya kenyamanan dalam bekerja	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19,690,000	19,030,000
	Terciptanya kenyamanan dalam bekerja	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	399,799,000	399,799,000
	Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	328,627,421	319,481,567
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	328,627,421	319,481,567
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	221,394,063	214,027,009
		Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	107,233,358	105,454,558
	Terwujudnya perlindungan perempuan di Labusel	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	79,472,035	36,312,035
	Terwujudnya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	50,000,000	20,000,000
	Menurunkan kekerasan terhadap perempuan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	30,000,000	-

		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	20,000,000	20,000,000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29,472,035	16,312,035
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	29,472,035	16,312,035
	Meningkatnya kualitas keluarga di Labusel	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	98,265,751	96,612,293
	Meningkatnya kualitas keluarga di Labusel	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota	73,822,802	72,169,344
	Meningkatnya kualitas keluarga di Labusel	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	73,822,802	72,169,344
	Menguat dan mengembangkannya lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	24,442,949	24,442,949
	Meningkatnya pemenuhan hak anak atas pengasuhan keluarga dan lingkungan	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24,442,949	24,442,949
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	101,995,740	96,356,341
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	23,499,802	22,737,972
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	23,499,802	22,737,972

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	78,495,938	73,618,369
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44,996,519	43,001,400
		Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33,499,419	30,616,969
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	476,741,055	402,634,350
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	460,941,607	391,054,602
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30,000,000	30,000,000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	20,000,000	20,000,000
		Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	149,995,632	94,550,164
		Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	260,945,975	246,504,438
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,799,448	11,579,748

		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,799,448	11,579,748
	Terkendalnya lonjakan penduduk	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	91,994,161	86,023,491
		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	91,994,161	86,023,491
		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	49,998,403	46,346,953
		Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	16,996,818	14,845,478
		Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	24,998,940	24,831,060
	Terwujudnya KB di Labusel	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1,718,462,606	1,240,095,462
	Terlaksananya advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	236,864,266	202,139,250
		Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	24,988,766	24,281,250
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	211,875,500	177,858,000
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	277,200,000	194,400,000
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	277,200,000	194,400,000

	Terdistribusikan kebutuhan alokon dan terlaksananya pelayanan KB	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	712,148,909	395,008,912
	Upaya Peningkatan Akseptor KB MKJP	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	553,253,000	260,468,000
	Terpenuhinya sarana penunjang pelayanan KB	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	109,997,000	102,190,000
		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	24,998,909	12,816,500
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	23,900,000	19,534,412
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan	492,249,431	448,547,300
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	492,249,431	448,547,300
	Terwujudnya pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1,997,888,809	1,781,740,116
	Terlaksananya pembangunan keluarga	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,967,899,910	1,766,279,816
		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1,967,899,910	1,766,279,816
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	29,988,899	15,460,300

		Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14,993,249	8,248,000
		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	14,995,650	7,212,300
			10,480,339,986	8,997,919,971
Rata-rata capaian kinerja (%)				85.86

TABEL 2.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024	CAPAIAN	KENDALA	TINDAK LANJUT	OPD PENANGGUNG JAWAB
II	NON PELAYANAN DASAR						
B	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	Persen	30.0	30.00	Tidak ada kendala	Akan dilanjutkan pada Tahun 2026	Dinas P3AP2KB Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan PPRG	Persen	60.0	50.00	Masih kurangnya pemahaman dan komitmen perangkat daerah terhadap PPRG	Melaksanakan pelatihan teknis PPRG dan memperkuat regulasi	Dinas P3AP2KB Kabupaten Labuhanbatu Selatan
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu	Persen	100.0	100.00	Tidak ada kendala	Akan dilanjutkan pada Tahun 2026	Dinas P3AP2KB Kabupaten Labuhanbatu Selatan
G	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1.2	1.33	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap program KB	Mengintensifkan penyuluhan KB dan kolaborasi dengan tokoh masyarakat	Dinas P3AP2KB Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	2.8	2.95	Terbatasnya akses pelayanan KB jangka panjang di wilayah terpencil	Perluasan layanan KB dan peningkatan ketersediaan alat kontrasepsi	Dinas P3AP2KB Kabupaten Labuhanbatu Selatan

3	Ratio Akseptor KB	Persen	74.9	50.77	Minimnya tenaga penyuluh dan edukasi kepada pasangan usia subur	Rekrutmen kader KB desa dan sosialisasi langsung ke rumah tangga	Dinas P3AP2KB Kabupaten Labuhanbatu Selatan
4	Cakupan Peserta KB Aktif	Persen	20.0	18.17	Kurangnya kepatuhan dan kesadaran peserta KB untuk tetap aktif ber KB	Peningkatan edukasi dan pemantauan rutin melalui kader atau petugas lapangan	Dinas P3AP2KB Kabupaten Labuhanbatu Selatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah sebuah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan berlokasi di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Desa Sosopan Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Propinsi Sumatera Utara, Kode Pos 21464.

Perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan diarahkan kepada bagaimana mengoptimalkan kekuatan yang dimiliki untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta berusaha memanfaatkan setiap peluang untuk mengantisipasi segala ancaman yang mungkin muncul.

Secara umum tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memadai melalui program dan Kegiatan yang tersedia pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga tercapai visi *“terwujudnya keluarga berkualitas sejahtera dan kesetaraan gender serta perlindungan anak”*.

Berdasarkan telaahan yang ada, berikut diuraikan target dan tujuan program yang tertuang dalam berbagai kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu:

- a. Menurunnya Total Fertility Rate (TFR).

- b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam program KB.
- c. Meningkatkan rata-rata usia kawin wanita menjadi 20 tahun.
- d. Meningkatnya penyelenggaraan Advokasi dan KIE pada semua tingkatan pelayanan dan pemangku kepentingan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- e. Meningkatnya kesertaan Ber-KB aktif
- f. Meningkatnya peserta KB baru
- g. Meningkatkan validitas Data Basis Keluarga dan Penduduk sebagai bahan pengolahan, analisa, evaluasi program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
- h. Terbinanya Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIK-R) di -5 kecamatan
- i. Terwujudnya Kabupaten Layak Anak
- j. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak.
- k. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- l. Terwujudnya kebijakan terpadu antara sektor untuk peningkatan kualitas SDM perempuan, kedudukan dan peranan perempuan termasuk dalam perumusan kebijakan dan mengambil keputusan secara adil dan proposional dalam berbagai bidang.
- m. Terwujudnya kesadaran, kepekaan dan kepedulian terhadap kesetaraan gender di seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, perencanaan dan penegakan hukum di semua tingkat dan segenap objek pembangunan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja

Dengan berdasarkan analisis RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dijabarkan kepada Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana akan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan peningkatan pembangunan infrastruktur, urusan dasar, wajib, dan pilihan.
2. Peningkatan koordinasi perencanaan dan anggaran yang berorientasi kepada output.
3. Peningkatan partisipasi masyarakat, koordinasi dan kerjasama dalam program dan kegiatan.
4. Peningkatan keamanan, ketentraman, dan kondisifitas kantor dan masyarakat.
5. Peningkatan kreatifitas, inovasi, dan kinerja pelayanan publik.

3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam menjalankan program pemerintah untuk satu tahun anggaran 2026 telah menyusun rencana kerja melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2					3	4	8	9	16	17
						DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN			10,605,000,000	11,665,500,000	
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			10,605,000,000	11,665,500,000	
	2 08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			8,505,000,000	9,355,500,000	
1	2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	6,560,000,000	7,216,000,000	
	2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4,095,000,000	4,504,500,000	
	2	08	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420 Orang/bulan	4,000,000,000	4,400,000,000	
	2	08	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	35,000,000	38,500,000	
	2	08	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	60,000,000	66,000,000	
	2	08	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	-	
	2	08	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	-	-	
	2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100,000,000	110,000,000	
	2	08	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	100,000,000	110,000,000	
	2	08	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	-	-	
	2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	295,000,000	324,500,000	

2	08	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30,000,000	33,000,000	
2	08	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	-	-	
2	08	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	30,000,000	33,000,000	
2	08	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	30,000,000	33,000,000	
2	08	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	0 Dokumen	5,000,000	5,500,000	
2	08	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	200,000,000	220,000,000	
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	1,050,000,000	1,155,000,000	
2	08	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	500,000,000	550,000,000	
2	08	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	200,000,000	220,000,000	
2	08	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	100,000,000	110,000,000	
2	08	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	50,000,000	55,000,000	
2	08	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	200,000,000	220,000,000	
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	700,000,000	770,000,000	

	2	08	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	-	-	
	2	08	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	200,000,000	220,000,000	
	2	08	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	500,000,000	550,000,000	
	2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	320,000,000	352,000,000	
	2	08	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	90,000,000	99,000,000	
	2	08	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	200,000,000	220,000,000	
	2	08	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	30,000,000	33,000,000	
	2	08	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	-	-	
2	2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	-	-	390,000,000	429,000,000	
	2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	120,000,000	132,000,000	
	2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	-	-	

2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
2	08	02	2.01	0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	0 Kebijakan	-	-	
2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	0 Lembaga	30,000,000	33,000,000	
2	08	02	2.01	0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0 Lembaga	30,000,000	33,000,000	
2	08	02	2.01	0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	0 Orang	-	-	
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	60,000,000	66,000,000	
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	0 Lembaga	-	-	
2	08	02	2.02	0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	0 Lembaga	-	-	

	2	08	02	2.02	0006	Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	0 Lembaga	-	-	
	2	08	02	2.02	0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	0 laporan	-	-	
	2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	0 orang	30,000,000	33,000,000	
	2	08	02	2.02	0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	0 Orang	30,000,000	33,000,000	
	2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	210,000,000	231,000,000	
	2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	0 Lembaga	30,000,000	33,000,000	
	2	08	02	2.03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	0 dokumen	30,000,000	33,000,000	
	2	08	02	2.03	0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	0 laporan	-	-	

	2	08	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	0 orang	150,000,000	165,000,000	
	2	08	02	2.03	0011	#####	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	0 Lembaga	-	-	
3	2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	-	-	255,000,000	280,500,000	
	2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	75,000,000	82,500,000	
	2	08	03	2.01	0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	0 laporan	15,000,000	16,500,000	
	2	08	03	2.01	0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	20,000,000	22,000,000	
	2	08	03	2.01	0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	0 orang	-	-	
	2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	0 Lembaga	20,000,000	22,000,000	

2	08	03	2.01	0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	0 Kebijakan	20,000,000	22,000,000	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	180,000,000	198,000,000	
2	08	03	2.02	0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	20,000,000	22,000,000	
2	08	03	2.02	0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	20,000,000	22,000,000	
2	08	03	2.02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	0 orang	20,000,000	22,000,000	
2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	20,000,000	22,000,000	
2	08	03	2.02	0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	0 orang	-	-	
2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 orang	50,000,000	55,000,000	
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 orang	50,000,000	55,000,000	

4	2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	-	-	130,000,000	143,000,000	
	2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-	130,000,000	143,000,000	
	2	08	04	2.03	0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	0 Orang	100,000,000	110,000,000	
	2	08	04	2.03	0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	0 Orang	-	-	
	2	08	04	2.03	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	0 Orang	-	-	
	2	08	04	2.03	0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	0 Orang	-	-	
	2	08	04	2.03	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	0 Orang	30,000,000	33,000,000	
5	2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	-	30,000,000	33,000,000	
	2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	30,000,000	33,000,000	

	2	08	05	2.01	0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	0 Lembaga	15,000,000	16,500,000	
	2	08	05	2.01	0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	0 Dokumen	15,000,000	16,500,000	
6	2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	-	-	240,000,000	264,000,000	
	2	08	06	2.01		Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	120,000,000	132,000,000	
	2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	30,000,000	33,000,000	
	2	08	06	2.01	0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	30,000,000	33,000,000	
	2	08	06	2.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Lembaga	30,000,000	33,000,000	
	2	08	06	2.01	0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
	2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	120,000,000	132,000,000	

	2	08	06	2.02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	0 Orang	50,000,000	55,000,000	
	2	08	06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Dokumen	35,000,000	38,500,000	
	2	08	06	2.02	0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0 Lembaga	35,000,000	38,500,000	
	2	08	06	2.02	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	-	
	2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	0 Lembaga	-	-	
7	2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	-	-	900,000,000	990,000,000	
	2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	110,000,000	121,000,000	

2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	0 Dokumen	40,000,000	44,000,000	
2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota	0 Kegiatan	-	-	
2	08	07	2.01	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	0 Laporan	15,000,000	16,500,000	
2	08	07	2.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	0 Dokumen	15,000,000	16,500,000	
2	08	07	2.01	0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	0 Orang	25,000,000	27,500,000	
2	08	07	2.01	0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	0 Kebijakan	15,000,000	16,500,000	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	260,000,000	286,000,000	
2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	30,000,000	33,000,000	
2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	30,000,000	33,000,000	

	2	08	07	2.02	0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	15,000,000	16,500,000	
	2	08	07	2.02	0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	15,000,000	16,500,000	
	2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	100,000,000	110,000,000	
	2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	30,000,000	33,000,000	
	2	08	07	2.02	0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Orang	20,000,000	22,000,000	
	2	08	07	2.02	0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	0 Orang	20,000,000	22,000,000	
	2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	530,000,000	583,000,000	
	2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	0 Dokumen	-	-	

	2	08	07	2.03	0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	0 Dokumen	-	-	
	2	08	07	2.03	0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Laporan	-	-	
	2	08	07	2.03	0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	0 Lembaga	-	-	
	2	08	07	2.03	0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
	2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	0 Orang	500,000,000	550,000,000	
	2	08	07	2.03	0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	0 Lembaga	-	-	
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2,100,000,000	2,310,000,000	
8	2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	-	850,000,000	935,000,000	

	2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-	360,000,000	396,000,000	
	2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	1 Kegiatan	25,000,000	27,500,000	
	2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1 Kegiatan	20,000,000	22,000,000	
	2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Kegiatan	20,000,000	22,000,000	
	2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000	55,000,000	
	2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	1 Satuan Pendidikan	30,000,000	33,000,000	
	2	14	02	2.01	0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
	2	14	02	2.01	0029	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	0 Kabupaten/Kota	30,000,000	33,000,000	

2	14	02	2.01	0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
2	14	02	2.01	0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
2	14	02	2.01	0032	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	0 Dokumen	35,000,000	38,500,000	
2	14	02	2.01	0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
2	14	02	2.01	0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	0 Perangkat Daerah	30,000,000	33,000,000	
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	490,000,000	539,000,000	
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	0 Laporan	50,000,000	55,000,000	
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	45,000,000	49,500,000	

	2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	45,000,000	49,500,000	
	2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	45,000,000	49,500,000	
	2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	35,000,000	38,500,000	
	2	14	02	2.02	0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
	2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
	2	14	02	2.02	0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	0 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
	2	14	02	2.02	0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	0 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
	2	14	02	2.02	0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	0 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
	2	14	02	2.02	0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	0 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
	2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	1 Unit	30,000,000	33,000,000	

	2	14	02	2.02	0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
	2	14	02	2.02	0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	0 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
9	2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	-	800,000,000	880,000,000	
	2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	175,000,000	192,500,000	
	2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	0 Laporan	25,000,000	27,500,000	
	2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Unit	25,000,000	27,500,000	
	2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Laporan	25,000,000	27,500,000	
	2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	0 Laporan	25,000,000	27,500,000	

	2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	0 Dokumen	25,000,000	27,500,000	
	2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	0 Dokumen	25,000,000	27,500,000	
	2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	0 Organisasi	25,000,000	27,500,000	
	2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-	110,000,000	121,000,000	
	2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	0 Unit	25,000,000	27,500,000	
	2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	0 Orang	25,000,000	27,500,000	
	2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	0 Organisasi	30,000,000	33,000,000	

2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	#####	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	425,000,000	467,500,000	
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan	25,000,000	27,500,000	
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	0 Orang	25,000,000	27,500,000	
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	0 Laporan	-	-	
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Dokumen	50,000,000	55,000,000	
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Unit	50,000,000	55,000,000	

2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	0 Orang	50,000,000	55,000,000	
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	0 Laporan	50,000,000	55,000,000	
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	0 Orang	30,000,000	33,000,000	
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	0 Orang	25,000,000	27,500,000	
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	0 Orang	30,000,000	33,000,000	
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	0 Orang	30,000,000	33,000,000	
2	14	03	2.03	0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	0 Kegiatan	30,000,000	33,000,000	
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-	90,000,000	99,000,000	

	2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	0 Unit	30,000,000	33,000,000	
	2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0 Kampung	30,000,000	33,000,000	
	2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	0 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
10	2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	-	450,000,000	495,000,000	
	2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	375,000,000	412,500,000	
	2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	30,000,000	33,000,000	
	2	14	04	2.01	0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	0 Kegiatan	30,000,000	33,000,000	
	2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	0 Laporan / Dokumen	30,000,000	33,000,000	

2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	0 Unit	30,000,000	33,000,000	
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	0 Orang	30,000,000	33,000,000	
2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Orang	30,000,000	33,000,000	
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	0 Laporan	30,000,000	33,000,000	
2	14	04	2.01	0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Dokumen	30,000,000	33,000,000	
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0 Orang	30,000,000	33,000,000	

	2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Laporan	15,000,000	16,500,000	
	2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	0 Kelompok	30,000,000	33,000,000	
	2	14	04	2.01	0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	0 Dokumen	-	-	
	2	14	04	2.01	0028	#####	#####	0 Kelompok	30,000,000	33,000,000	
	2	14	04	2.01	0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	0 Laporan	-	-	
	2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	75,000,000	82,500,000	
	2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	0 laporan	25,000,000	27,500,000	

	2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	0 laporan	30,000,000	33,000,000	
	2	14	04	2.02	0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	0 Laporan	-	-	
	2	14	04	2.02	0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	0 Laporan	20,000,000	22,000,000	
	J U M L A H								10,605,000,000	11,665,500,000	

BAB IV PENUTUP

Apabila tersedia anggaran yang memadai maka semua program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan target yang diinginkan akan tercapai, demikian sebaliknya seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka *program* dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan akan berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional serta RPJP dan RPJM Propinsi, visi dan misi kepala daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, DPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk tindak lanjut dalam penyusunan Renja ini selanjutnya kami akan menyusun Program kegiatan dan anggaran dalam bentuk RKA serta Rencana Operasional Kegiatan Tahun 2026.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, terarah, efektif dan efisien.